

## Menggali Hubungan antara Media Sosial dan Kebijakan Pemerintah: Pendekatan Bibliometrik dan Tinjauan Pustaka

### Exploring the Relationship between Social Media and Government Policy: A Bibliometric Approach and Literature Review

\*Muhammad Dimas Rizqi, Wendi Aji Saputra<sup>2</sup>, Mardi Murahman<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas

\*Corresponding author: muhammaddimasrizqi@gmail.com

**ABSTRACT** As social media has a growing significance in public life, questions occur on the extent to which social media shapes government sector. The purpose of this study is to explore the relationship between social media and government policy using a literature and bibliometric study approach. The method used in this study uses the bibliometric method and data of journals taken as published or perished as many as 97 journals from 2012-2022 and 50 journals were taken as samples according to this research. In addition, VOSviewer functions to determine gaps between research from previous journals or articles from both 2012-2022. The findings in this study were that of the 50 journals used, 605 cites and 137.41 cites per year were obtained. Then, from the analysis using VOSviewer it was found (1) there was a visible visual network between co-words from government, public policy, social media and so on, (2) there was a visual overlay to see journals from old to newest marked in dark blue up to bright yellow in color (2012-2022), (3) there is visual density that the yellow color in the largest circle diameter means the keywords are denser and appear more frequently, and the brighter the color, the less it blends with the green background. Based on these findings, it is obvious that social media has a strong relationship in the formulation of policies carried out by the government.

**KEYWORDS** Bibliometrics; Government Policy; Social Media.

**ABSTRAK** Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menggali hubungan media sosial dan kebijakan pemerintah dengan pendekatan studi literatur dan bibliometrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode bibliometrik dan data atau jurnal yang diambil pada *publish or perish* sebanyak 97 jurnal dari tahun 2012-2022 dan diambil 50 jurnal sebagai sampel yang sesuai dengan penelitian ini. Selain itu, VOSviewer yang berfungsi untuk menentukan gap antara penelitian dari jurnal atau artikel terdahulu baik dari tahun 2012-2022. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah dari 50 jurnal yang digunakan didapatkan 605 *cites* dan 137,41 *cites per year*. Kemudian, dari analisis menggunakan VOSviewer ditemukan (1) adanya *Network Visualization* yang terlihat antar *co-word* baik dari *government*, *public policy*, *social media* dan lain sebagainya, (2) adanya *Overlay Visualization* untuk melihat jurnal dari yang lama sampai yang terbaru ditandai dengan warna biru gelap sampai dengan warna kuning terang (2012-2022), (3) adanya *Density Visualization* bahwa warna kuning pada diameter lingkaran terbesar berarti kata kunci lebih padat dan lebih sering muncul, dan semakin terang warnanya, semakin jarang menyatu dengan latar belakang hijau. Sehingga jika dieksplorasi lebih mendalam secara keseluruhan maka *co-word* media sosial memiliki hubungan yang kuat dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

**KATA KUNCI** Bibliometrik; Media Sosial; Kebijakan Pemerintah.

## PENGANTAR

Berdasarkan sejarah terutama pada saat terjadinya reformasi 1998 menjadi momentum atau titik balik daripada kebebasan berkeekspresi serta berkembangnya demokrasi yang baik dalam penggunaan media sosial. Selain itu, adanya amandemen kedua dari UUD 1945 serta UU HAM yang sudah menjadi hak masyarakat untuk bebas dalam informasi dan bermedia (Nugroho et al., 2013)

Dewasa ini media terutama media online menjadi alat kepentingan yang berfungsi untuk penyampaian berita ataupun kebijakan dari pemerintah. Peran media ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Karena berita atau kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah ini akan menjadi bahan konsumsi publik, baik itu akan menjadi pro maupun kontra terhadap suatu kebijakan dari pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Livingstone, (2013) untuk menarik dan mempertahankan perhatian warga negara menjadi tanggungjawab oleh pemerintah dalam demokrasi yang modern serta untuk membentuk opini warga negara, perilaku politik sampai dengan pemungutan suara dalam hal ini partisipasi dalam pemilihan umum. Dengan teknologi modern dan meningkatnya media sosial secara massif, maka masyarakat akan bebas untuk memilih sumber informasi lain terlepas dari tantangan mereka dan mempercayai mereka sebagai sumber informasi (Muyagi & Olengurumwa, 2014).



**Gambar 1. Grafik Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Tahun 2017-2022**

Sumber: Mahdi, (2022)

Dari grafik 1 di atas dapat disimpulkan maka penggunaan media sosial, seperti twitter, facebook, tiktok, telegram dan lain sebagainya di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya pula ICT. Dari grafik tersebut jumlah pengguna dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sekitar 191 juta pengguna. Jumlah tersebut terbagi kedalam beberapa media sosial, seperti Instagram 84,8%, Whatsapp 88,7%, Telegram 62,8%, Tiktok 63,1%, dan Facebook 81,3%, (Mahdi, 2022).

Sementara itu, Purcell, (2010) mengatakan bahwa dalam lingkungan media multi-platform ini, hubungan masyarakat dengan berita menjadi terbagi menjadi tiga matrik yang menonjol, yaitu portabel, personal, dan partisipatif. Tiga matrik tersebut dalam temuannya dijewantahkan, seperti portable: 33% pemilik ponsel sekarang mengakses berita di ponsel mereka, kemudian personal: 28% pengguna internet telah menyesuaikan halaman rumah mereka untuk memasukkan berita dari sumber dan topik yang sangat menarik bagi mereka, dan partisipatif: 37% pengguna internet telah berkontribusi dalam pembuatan berita, mengomentarnya, atau

menyebarkannya melalui postingan di media sosial twitter maupun facebook.

Berbagai pandangan muncul ketika kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta hubungan media sosial dan masyarakat tidak akan terlepas dari proses penetapan kebijakan. Bahkan kehadiran media sosial khususnya di kalangan pengguna kelas menengah digunakan sebagai instrumen untuk merespon kebijakan publik (Makhya & Windah, 2019). Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena memang penggunaan media sosial ini akan terbentuk berbagai karakteristik, seperti transparansi, partisipasi, kolaborasi dan kenyamanan serta akan mengarah pada keberhasilan komunikasi (A.Mishaal & Abu-Shana, 2015).

Dengan demikian, peneliti mengambil topik tentang peran media sosial dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia. Mengapa peneliti mengambil topik tersebut? karena dengan perkembangan IT yang terus meningkat bahkan secara drastis tentu masyarakat juga akan secara mudah mendapatkan informasi baik dari artikel berita online, media sosial, maupun media cetak tentang kebijakan, press conference dari presiden dan lain sebagainya. Untuk itu, penting mencari sebuah gap bagaimana hubungan media sosial dan kebijakan pemerintah di Indonesia? Apakah ada hubungan secara signifikan atau malah sebaliknya. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk melihat ataupun mengetahui bagaimana hubungan media sosial dan kebijakan pemerintah. Dengan melihat gap antara media sosial dan kebijakan pemerintah jika ditinjau dari studi literatur dan bibliometrik.

Media sosial merupakan system yang ada pada ruang lingkup secara online. Dimana system sudah terbentuk dengan sendirinya melalui konsep yang dibangun oleh para pengembang aplikasi. Fungsi dari media sosial salah satunya adalah untuk dapat mengakses kegiatan, keperluan, keinginan secara terbuka dengan menggunakan media yang digunakan. Bahkan dalam pembuatan kebijakan pun peran media juga dapat mempengaruhi pemilih dengan menciptakan atau membentuk isu-isu tertentu (Christian, 2013; Grossman, 2022; Sharma, 2020). Peran media adalah kunci tidak hanya di awal, tetapi di seluruh proses kebijakan, dan juga media tidak hanya sebagai pemain eksternal dalam proses kebijakan tetapi sebagai pemain internal (Muyagi & Olengurumwa, 2014).

Dalam literatur terdahulu dari (Nguyen, 2021) media sosial telah menjadi sangat diperlukan sebagai platform pengaturan agenda (*Agenda Setting*), dan adanya teknologi buatan dan kecerdasan buatan (*Artificial Intellegence*) memungkinkan untuk memperoleh wawasan kritis mengenai persepsi dan sikap individu warga negara, dan menginformasikan proses pembuatan suatu kebijakan. Secara fakta memang media sosial dapat mempengaruhi struktur peluang untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan (Bekkers & Edwards, 2015; Yeung, 2018). Berbanding terbalik dengan temuan Owen (2018), dia mengatakan bahwa media memiliki posisi ambigu karena akan berfungsi sebagai corong politisi membuat jurnalis terlibat dalam penyebaran informasi yang buruk dan fakta yang salah (*Hoax*). Oleh karena itu, penting tentunya dalam memanfaatkan sosial media untuk kepentingan yang positif. Ada lima tips dalam menggunakan sosial media

yang dilakukan oleh pemerintah menurut (Beveridge & Tran, 2022), yakni a) pelajari di mana audiens Anda berkumpul, b) Bagikan konten dan informasi yang relevan dan berharga, c) terlibat dengan pengikut anda, d) Mengamankan akun sosial media, d) tetap mematuhi privasi dalam bersosial media.

Media sosial memiliki pandangan atau persepsi tersendiri oleh khalayak umum dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial, budaya, hukum, politik, keamanan dan lain sebagainya. Sikap yang ditunjukkan oleh pengguna media sosial juga memiliki kepercayaan (*trust*) terhadap media khususnya twitter dalam mempengaruhi proses kebijakan yang diberikan oleh pemerintah (Park et al., 2016). Temuan yang menarik juga tersaji dalam penelitian ini yakni dari Madyatmadja et al. (2020), dalam penelitian tersebut bahwa penggunaan media sosial di lingkungan pemerintahan dipengaruhi oleh faktor-faktor melalui lima dimensi yang berbeda, antara lain sosial ekonomi, kebijakan, hukum & politik, manajerial & organisasi, dan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sedangkan dalam penelitian Nurmandi et al. (2018), menemukan bahwasannya penggunaan media sosial juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemimpin atas maupun menengah, aspek hukum dalam media sosial, dan kerangka kebijakan serta pengelolaan perubahan internal.

Dengan adanya Instagram, twitter, facebook, youtube dan lainnya berfungsi sebagai platform interaktif dua arah yang cepat dan murah serta untuk berdiskusi antara pemerintah dengan masyarakat (Nurmandi, 2014). Sementara itu, media sosial juga telah digunakan secara luas untuk

mengkomunikasikan informasi, kesadaran, dan mempromosikan kebijakan publik oleh lembaga pemerintah (Rathore et al., 2021). Perbedaan tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosial media memiliki berbagai macam fungsi dalam mengendalikan maupun mengintervensi kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya, penggunaan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada warga atau pelayanan pemerintah ke warga (G2C) sehingga terciptanya pelayanan kepada warga yang lebih interaktif, transparan, partisipatif, dan kolaboratif (Bertot et al., 2012; McNutt, 2014; Mergel, 2014).

Berdasarkan laporan dari Criado et al., (2017) dalam rekomendasinya tentang kebijakan penggunaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah terdapat berbagai macam saran atau catatan yang harus dipedomani oleh pemerintah. Salah satunya adalah strategi media sosial memungkinkan pemangku kepentingan yang relevan untuk diidentifikasi dan kolaborasi yang lebih luas sehingga kepentingannya akan tercapai. Kemudian, media sosial dapat menentukan seberapa jumlah postingan, jenis informasi, dan mengelola ekspektasi penggunanya. Selain itu, dalam rekomendasinya itu media sosial dapat dengan mudah untuk melakukan koordinasi dengan institusi lain sehingga adanya praktik terbaik secara langsung, serta alokasi tugas dan tanggungjawab dalam mengelola media sosial dapat meningkatkan kemandirian dalam mengorganisasikan media sosial.

Sementara itu media sosial dapat memperluas keterlibatan masyarakat, namun dalam lingkungan digital dapat mempengaruhi reputasi sosial bukan otoritas birokrasi (McNutt, 2014). Dalam

temuan lain bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi secara lebih efektif dan efisien dengan mengotomatisasi fungsi birokrasi mesin (Cordella & Tempini, 2015). Selain itu bahwa mengeksplorasi rasional media sosial dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat dan memperluas partisipasi dan interaksi dengan warga, mengenai kebijakan dan layanan publik baru atau yang sudah ada (Charalabidis et al., 2012).

Kemudian, pengaplikasian media sosial yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan tinjauan yang detil baik dari sumber daya maupun kemampuan daerahnya. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh (Medina, 2019), bahwa dalam mengambil kebijakan yang diadopsi dari media sosial, nampaknya harus melihat konteks lokal terlebih dahulu karena akan memberikan potensi masalah baru bagi sebuah kota jika menggunakan sistem peringkat sebagai tolok ukur untuk meniru kinerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskripsi kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan penggunaan bibliometrik pada *software VOSviewer* yang terkait pada judul penelitian ini. Penggunaan bibliometrik memiliki potensi tepat guna dalam mengungkap struktur intelektual dan perubahan bidang penelitian yang berbeda (Muñoz-Leiva et al., 2012). Proses perubahan tersebut yang akan memberikan kesempatan untuk meminimalisir perkembangan yang menarik pada bidang penelitian ini serta dapat memprediksi tema penelitian yang kurang memberikan kontribusi yang positif pada literatur untuk masa depan (Cho & Khang, 2006; Echchakoui & Mathieu, 2008; Muñoz-Leiva et al., 2012).

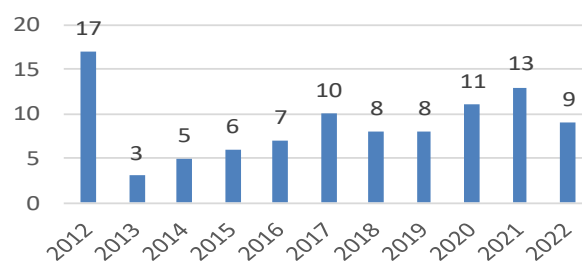
Dalam pengumpulan data peneliti mencari tinjauan literatur sebanyak 97 jurnal atau artikel yang diambil pada tahun 2012-2022. Data tersebut didapat dari *publish or perish* dengan *title words: media; government policy*. Kemudian, dalam menganalisis data peneliti menggunakan *software VOSviewer*. Fungsionalitas *VOSviewer* ini sangat bermanfaat untuk menampilkan secara visual/gambar bibliometrik serta memudahkan dalam penafsiran (Van Eck & Waltman, 2010). Program *VOSviewer* juga dapat memberikan kemudahan analisis data dengan memanfaatkan perangkat pemetaan dan memberikan analisis perkembangan penelitian (Fitria et al., 2021).

## PEMBAHASAN

### Analisis Bibliometrik

Pada bab ini penulis akan melihat bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah berdasarkan studi literatur yang dipilih untuk menentukan gap atau pemetaan dan juga perkembangan penelitian yang ada. Untuk mengkaji bibliometrik membutuhkan kajian yang dapat menjelaskan bagaimana pola memanfaatkan dokumen, literatur atau sumber informasi yang berkaitan (Tupan, 2016).

Grafik 2. Tingkat Literatur tentang Media; Government Policy



Gambar 2. Tingkat Literature tentang Media

Aplikasi bibliometrik menurut (Mallig, 2010), memiliki beberapa bagian, yakni analisis bibliometrik (kinerja) dengan aspek tingkat perilaku yang berbeda, dan analisis jaringan bibliometrik secara visual. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis jaringan bibliometrik secara visual. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan dalam menganalisis *title words: media; government policy* dari *publish or perish* kemudian dianalisis menggunakan VOSviewer yang menjelaskan *co-word* secara visual.

Dari 97 jurnal yang didapatkan pada *publish or perish* penulis mengambil 50 judul artikel yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini serta berdasarkan tahun terbit selama 10 tahun terakhir, yakni tahun 2012-2022. Proses pencarian jurnal atau artikel pada *publish or perish* menemukan bahwa dari 50 jurnal atau artikel terdapat 605 *cites* dan 137,41 *cites per year*. Temuan tersebut dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Data Penelitian tentang *Media; Government Policy*

No	Author	Title	Cites	Cites Per Year	Year
1	PT Jaeger, JC Bertot, K Shilton	Kebijakan informasi dan media sosial: Membingkai interaksi web 2.0 warga negara pemerintah	81	8.10	2012
2	Y Charalabidis, E Loukis, R Kleinfeld	Menuju rasionalisasi eksploitasi media sosial dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah	12	1.20	2012
3	SJ Tanner	Media, pemerintahan minoritas, politik dan kebijakan	0	0.00	2012
4	JC Bertot, PT Jaeger, JM Grimes	Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas melalui TIK, media sosial, dan e-government kolaboratif	11	1.10	2012
5	K McNutt	Media Sosial & Pemerintah 2.0	3	0.30	2012
6	E Falcao, R Kleinhas	Rekomendasi kebijakan untuk penggunaan media sosial oleh pemerintah untuk kolaborasi dengan warga	2	0.20	2012
7	Q Zhang, JL Chan	Perkembangan baru: Transparansi fiskal dalam kebijakan Pemerintah China dan peran media sosial	30	3.33	2013
8	A Nasir	Tinjauan Media Tentang Tantangan Kebijakan Luar Negeri yang Menghadapi Pemerintahan Baru	2	0.22	2013
9	B Kusumasari	Keterlibatan Masyarakat: Menghubungkan Suara Remaja melalui Media Sosial dan Implikasinya terhadap Pembuatan Kebijakan Pemerintah	0	0.00	2013
10	Y Luo	Internet dan pengaturan agenda di Cina: Pengaruh opini publik online pada liputan media dan kebijakan pemerintah	139	17.38	2014
11	M Gintova	Kebijakan Pemerintah Terbuka di Kanada: Akankah Media Sosial Mengubah Interaksi antara Pemerintah dan Warga?	4	0.57	2015
12	CH Liao	Sosialisasi Kebijakan Kewirausahaan Melalui Media Sosial Pemerintah: Studi Kasus Program U-Start	0	0.00	2015
13	MJ Park, D Kang, JJ Rho, DH Lee	Peran kebijakan media sosial dalam mengembangkan kepercayaan publik: komunikasi Twitter dengan para pemimpin pemerintah	81	13.50	2016
14	F Heaselgrave, P Simmons	Budaya, kompetensi, dan kebijakan: Mengapa dialog media sosial terbatas di pemerintah lokal Australia	32	5.33	2016
15	S Waldmann, S Verga	Melawan ekstremisme kekerasan di media sosial: Tinjauan literatur terbaru dan proyek Pemerintah Kanada dengan panduan untuk praktisi, pembuat kebijakan, dan peneliti	2	0.33	2016

Lanjutan tabel 1.

No	Author	Title	Cites	Cites Per Year	Year
16	P Chaturvedi, T Day, M DeLacure, B Hill, M Myers, M. Walthon	Memberdayakan Publik untuk Mendorong Pengembangan Kebijakan: Peran Media, Pemerintah dan Organisasi Nirlaba	0	0.00	2016
17	CR Apaza, Y Chang	Whistleblowing di dunia: Kebijakan pemerintah, media massa dan hukum	16	3.20	2017
18	Patterson TE	Liputan Berita 100 Hari Pertama Donald Trump	5	1.00	2017
19	E Falco, R Kleinhans	Rekomendasi kebijakan untuk penggunaan media sosial oleh pemerintah untuk kolaborasi dengan warga. Ringkasan Kebijakan Eropa Perkotaan	4	0.80	2017
20	S Roengtam, A Nurmandi, DN Almarez, A Kholid	Apakah media sosial mengubah pemerintah kota? Studi kasus di tiga kota ASEAN. Transformasi Pemerintah: Orang, Proses dan Kebijakan	2	0.40	2017
21	L Xu	Penelitian tentang tanggung jawab pemerintah dalam komunikasi kebijakan publik di era semua media	1	0.20	2017
22	Y KATZ	Menuju Mode Kebijakan Responsif Di Media Sosial Dan Hubungan Pemerintah	0	0.00	2017
23	A Nurmandi, D Almarez, S Roengtam	Sejauh mana media sosial digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah kota? Studi kasus di tiga kota ASEAN	41	10.25	2018
24	E Satispi	Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Regulasi Di Media	0	0.00	2018
25	GA Porumbescu	Menilai implikasi media massa online untuk evaluasi warga terhadap pemerintah	2	0.50	2018
26	OB Driss, S Mellouli, Z Trabelsi	Dari warga hingga pembuat kebijakan pemerintah: Analisis data media sosial	79	26.33	2019
27	PS Medina, TA Bryer	Keterbatasan Menilai Keterlibatan Warga Negara Melalui Pemingkatan Media Sosial Pemerintah Daerah: Implikasinya Terhadap Kebijakan dan Praktik	2	0.67	2019
28	SYJ Beilag	Kajian Tingkat Pengaruh Propaganda Media Sosial dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah di Sudan Selatan	0	0.00	2019
29	Y Jun, Z Xue, W Yunqi, Y Xin	Agenda Publik, Agenda Media dan Proses Komunikasi Kebijakan Laporan Tahunan Pemerintah: Berdasarkan Survei di 19 Kota di Tiongkok	0	0.00	2019
30	A Gallon	Bagaimana Legislator Negara Bagian Dapat Menggunakan Media untuk Mempengaruhi Perubahan Kebijakan di Instansi Pemerintah Negara Bagian: Studi Kasus dengan Departemen Kendaraan Bermotor	0	0.00	2019
31	M Cai, D Wang	Mekanisme difusi kebijakan di pemerintah daerah mengadopsi media sosial asing di China	0	0.00	2019
32	M Gintova	Kebijakan Pemerintah Terbuka dan Penggunaan Media Sosial di Pemerintahan di Kanada: Putusnya Implementasi	0	0.00	2019
33	EA Sukma, AN Hidayanto	Analisis Sentimen Kebijakan Pemerintah Indonesia Baru (Omnibus Law) di Media Sosial Twitter	14	7.00	2020
34	D Uniyal, S Uniyal	Media Sosial Muncul sebagai Mata Ketiga!! Menguraikan Sentimen Pengguna tentang Kebijakan Pemerintah: Studi Kasus GST	2	1.00	2020
35	J Indrawan, AN Salsabila	Pemanfaatan Media oleh Pemerintah Indonesia Terkait Kebijakan Penanganan Covid19	0	0.00	2020

Lanjutan tabel 1.

No	Author	Title	Cites	Cites Per Year	Year
36	HTN Nguyen	Memahami Kebijakan Media Berita di Vietnam: Analisis Ekonomi terhadap Intervensi Pemerintah dalam Pasar Berita yang Dikelola Negara	0	0.00	2020
37	JIA Zhemin, FU Liuying	Status Quo, Karakteristik dan Kecenderungan Komunikasi Kebijakan Melalui Media Sosial Pemerintah: Kasus Kebijakan Pemilahan Sampah di Shanghai	0	0.00	2020
38	AD Malawani, A Nurmandi, EP Purnomo, T Rahman	Media sosial dalam membantu penanganan pascabencana	7	3.50	2020
39	X Han, C Baird, F Klein	Pesan Pemerintah di Media Sosial, Kepercayaan Publik kepada Pemerintah, dan Kepatuhan Publik terhadap Kebijakan Publik: Bukti dari Analisis Teks Tanggapan Pemerintah terhadap COVID-19	0	0.00	2020
40	M Salehudin, A Arifin, D Napitupulu	Memperluas Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk E-Learning dan Penggunaan Media Sosial.	28	28.00	2021
41	S Weng, G Schwarz, S Schwarz	Kerangka kerja untuk tanggapan pemerintah terhadap partisipasi media sosial dalam pembuatan kebijakan publik: bukti dari Tiongkok	2	2.00	2021
42	F Dicks, T Marks, E Karafillakis, MA Chambers	Vaksinasi Sebagai Alat Pengendali pada Bovine Tuberculosis: Pemantauan Media Sosial untuk Menilai Respon Masyarakat Terhadap Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Pemerintah	1	1.00	2021
43	LA MANI, I RAHYADI, M ARAS	Kebijakan pemerintah dan COVID-19: Wawasan dan sikap masyarakat umum di media sosial	0	0.00	2021
44	A Supandi, S Zauhar, E Setyowati	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah: Opini Media Baru dan Tinjauan Singkat Implementasi Kebijakan di Indonesia Terkait Pandemi COVID-19	0	0.00	2021
45	I Cholissodin	Komputasi Sosial untuk Membuat Draf Cetak Biru Dokumen Kebijakan Publik Pemerintah Berdasarkan Data Media Sosial Tentang Covid-19 Menggunakan Hybrid LSTM dan MMR	0	0.00	2021
46	N ULFATUL	Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Di Bela Beli Kulon Progo Melalui Media Kampanye Membangun Regional Branding	0	0.00	2021
47	S Essa, B Harvey	Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Arab Saudi: Analisis Wacana Kritis Media dan Dokumen Kebijakan Pemerintah	0	0.00	2022
48	M Habibi, MR Ma'arif, D Subekti	Pengembangan Sistem Intelijen Media Sosial untuk Analisis Opini dan Persepsi Warga atas Kebijakan Pemerintah	0	0.00	2022
49	A Setiawan, A Nurmandi, HA Saputra	Perbandingan Kampanye Kebijakan Vaksinasi Pemerintah India dan India melalui Media Sosial Twitter	0	0.00	2022
50	NSM Tahir, S Mohamed	Pentingnya penggunaan media sosial dalam mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah: Analisis skema i-Sinar Employee Provident Fund Malaysia	0	0.00	2022

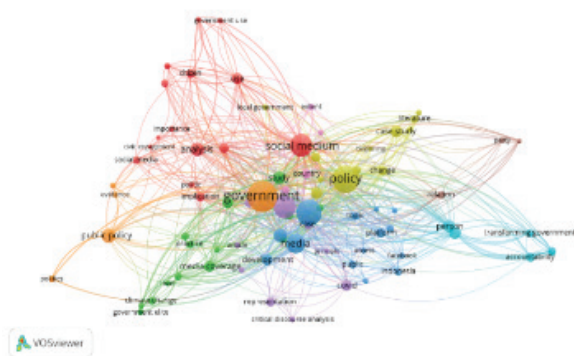
Sumber: Olah Data Penulis, 2022



Berdasarkan tabel 1 tersebut bahwa tinjauan literatur tentang media sosial dengan kebijakan itu memang sangat terkait. Selanjutnya, peningkatan pesat dalam penggunaan media sosial oleh warga, ancaman keamanan, dan kemungkinan kejutan strategis telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan berbagai strategi dan alat pemantauan online (Bekkers & Edwards, 2015).

### Network Visualization: Media; Government Policy

Network visualization merupakan sebuah alat yang ada pada VOSviewer dan berfungsi untuk melihat bagaimana jaringan antara kluster-kluster yang terbentuk. Sementara itu VOSviewer dapat digunakan sebagai alat pemetaan untuk menganalisis data secara bibliometrik (Fitria et al., 2021). Untuk melihat jaringan peta secara visual tentang media sosial dan kebijakan dapat di lihat pada gambar 3. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut diambil dari *publis or perish* dengan *title Media; Government Policy*.



Gambar 3. Network Visualization

Berdasarkan gambar 3 di atas yang dihasilkan dari olah data melalui VOSviewer maka terdapat jaringan antara pemerintah, media sosial, kebijakan dan lain sebagainya. Semakin besar suatu item, semakin besar

label dan lingkaran item tersebut serta untuk beberapa item, label mungkin tidak ditampilkan, Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih antar label atau lingkaran (Jan van Eck & Waltman, 2017). Jaringan pada gambar 1 terbagi ke dalam 9 kluster, 88 item, 724 links, dan total link strength 1260. Links yang berarti jumlah penulisan tautan penulisan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, sedangkan total link strength menunjukkan kekuatan tautan total pada *co-authorship* dari peneliti satu dengan peneliti lainnya (Jan van Eck & Waltman, 2017). Kluster tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. Klusterisasi Network Visualization

Kluster/warna	Konten
kluster 1 ada 17 item (warna merah)	analisis, Canada, citizen, civic engagement, e-learning, government decision, government use, implication, importance, Indonesia government policy, influence, open government policy, politic, social media, social media usage, social medium, use. China, climate change, control, fact,
Kluster 2 ada 15 item (warna hijau)	government elite, internet, level, media agenda, media coverage, media policy link, news medium, policy agenda, practice, public opinion, study.
Kluster 3 ada 14 item (warna biru)	Access, basic principle, development, facebook, government social media, Indonesia, media, medium, platform, policy analysis, policy communication, public, role, topic.
kluster 4 ada 12 item (warna kuning)	Beginning, case study, change, department, government media policy, literature, law, local government, mass medium, policy, research, world.
Kluster 5 ada 9 item (warna ungu)	Article, case, coverage, covid, critical discourse analisis, government policy, media policy, principle, representation.

Lanjutan tabel 2.

Kluster/warna	Konten
Kluster 6 ada 6 item (warna biru muda)	Accountability, collaborative e-Government, ICTs, person, process, transforming government
Kluster 7 ada 6 item (warna orange)	Evidence, government, politics, public policy, public trust, Shorenstein center
Kluster 8 ada 5 item (warna coklat)	Democratic government, elite press, media and foreign policy, party, relation
Kluster 9 ada 4 item (warna ungu muda)	Country, extent, impact, new government.

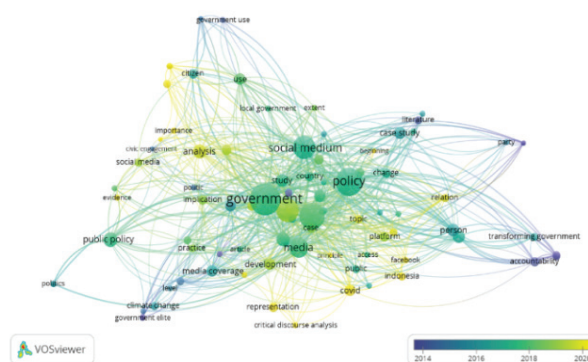
Berdasarkan tabel 2 di atas bahwa kluster yang didapat dari VOSviewer beserta isi atau kontennya saling memiliki jaringan atau bisa dikatakan parameter jaringan. Semakin tinggi nilai parameter maka semakin besar jumlah cluster yang dihasilkan oleh teknik clustering VOS (Jan van Eck & Waltman, 2017). Seperti pada kluster 7 (*government*) memiliki jaringan yang terbesar daripada kluster lain salah satunya berjejaring dengan (*policy*), pada kluster 4 dan kluster 1 (*social medium*) serta masih banyak yang memiliki keterkaitan dari berbagai kluster yang ada. Jarak antara jurnal yang ada dalam visualisasi kira-kira menunjukkan keterkaitan jurnal dalam hal tautan *co-citation* (garis). Secara umum, semakin dekat jurnal satu dengan yang lainnya maka semakin kuat pula keterkaitannya (Jan van Eck & Waltman, 2017).

**Overlay Visualization: Media; Government Policy**

Overlay Visualisation merupakan sebuah peta untuk melihat bagaimana hubungan maupun nilai dari yang terendah ke nilai yang tertinggi. Hal itu ditandai dengan warna yang paling gelap ke warna yang paling terang. Peta untuk menentukan bibliomatrik guna menunjukkan bahwa bagaimana skor

dipetakan ke warna (Jan van Eck & Waltman, 2017).

Dari gambar 4 di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat warna dari warna biru gelap sampai berubah ke warna kuning terang. Tingkat warna tersebut didapat dari jurnal yang ditemukan dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Pada gambar 4 di bawah ini menunjukkan adanya jaringan yang ditandai dari warna dan garis-garis yang ada dan hasilnya dari jurnal atau artikel tentang *title : media; government policy di publish or perish* selama 2012-2022.



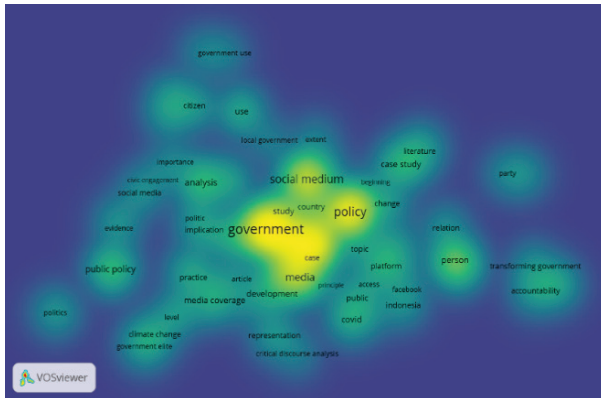
Gambar 4. Overlay Visualization

**Density Visualization: Media; Government Policy**

Density Visualisation merupakan sebuah peta untuk melihat bagaimana kondisi atau peta yang menunjukkan jurnal atau penelitian yang terkait. Penjelasan itu sama halnya dengan peta overlay visualization, namun yang membedakan paling vital adalah bentuknya. Peta densitas Co-Word berfungsi untuk mendapatkan gambaran umum tentang struktur umum peta dengan menunjukkan item mana yang dianggap penting untuk dianalisis (Muñoz-Leiva et al., 2012).

Pada gambar 5 di bawah ini menunjukkan adanya tingkat kepadatan penelitian dan hasil

dari pencarian jurnal atau artikel tentang *title: media; government policy* pada *publish or perish* selama 2012-2022. Peta kerapatan yang berarti semakin kuning warnanya dengan besarnya lingkaran maka semakin sering co-wordnya berarti semakin sering muncul dan jika warnanya memudar maka menyatu dengan background hijau semakin jarang muncul (Tupan, 2016).



**Gambar 5.** *Density Visualization*

## SIMPULAN

Dari uraian di atas tentang hubungan antara media sosial dan kebijakan pemerintah dengan pendekatan tinjauan literatur dan kajian bibliometrik dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan tidak akan terlepas dari peran media khususnya media sosial. Para peneliti terdahulu menemukan berbagai macam temuan yang menarik khususnya peran media sosial dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selain itu, temuan lain pada penelitian ini adalah penggunaan bibliometrik dan tinjauan literatur untuk mencari dan melihat bagaimana gap antara media sosial dan kebijakan pemerintah. Sehingga penulis menemukan adanya jaringan visual, visual overlay, dan visual densitas yang dihasilkan pada VOSViewer serta untuk mendapatkan literatur dari *publish or perish* dengan *title*

*Media; Government*. Media sosial telah menjadi sangat diperlukan sebagai platform agenda setting, dan munculnya teknologi mesin, kecerdasan buatan (*Artificial Intelegent*) yang memungkinkan untuk memperoleh wawasan kritis mengenai persepsi dan sikap individu warga negara, serta menginformasikan proses pembuatan kebijakan (Nguyen, 2021). Kemudian, kepercayaan warga terhadap media pemerintah berfungsi sebagai moderator untuk memperluas kepercayaan mereka kepada pemerintah dari tingkat lembaga ke tingkat pemerintah secara keseluruhan (Park et al., 2016).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur untuk semua kalangan baik akademisi, pemerintah maupun masyarakat. Penggunaan metode bibliometrik dalam penelitian ini dipilih untuk melihat bagaimana gap literatur yang sudah ada dengan yang paling terbaru. Hal itu dapat dilihat pada temuan network visualization dan density visualization dari VOSviewer. Dimana adanya keterbaruan literatur terus meningkat seiring juga dengan perkembangan teknologi media sosial. Selain itu, bibliometrik juga berguna dalam melihat temuan yang sama maupun yang berbeda. Sehingga visualisasi hasil penelitian ini merepresentasikan co-word yang dominan antara media sosial dan kebijakan pemerintah serta memiliki hubungan yang kuat antar keduanya.

Akhirnya, penelitian ini akan memberikan luaran yang cukup guna menambah referensi bagi para penulis. Untuk meneruskan kajian ini lebih mendalam maka kedepan penulis akan memberikan temuan baru tentang media sosial akan mempengaruhi semua

proses pembuatan kebijakan, baik dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan pada tahap akhir adalah pada evaluasi kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan bagaimana yang seharusnya pemerintah lakukan penyerapan aspirasi (*demand*) dari masyarakat melalui media sosial, kemudian bagaimana tahapan pelaksanaan kebijakan jika di kontrol dengan media sosial, serta bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media sosial yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Mishaal, D., & Abu-Shana, E. b. (2015). *The Effect of Using Social Media in Governments: Framework of Communication Success*. 357-364. <https://doi.org/10.15849/icit.2015.0069>
- Bekkers, V., & Edwards, A. (2015). *The role of social media in policy processes*.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 6(1), 78-91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>
- Beveridge, C., & Tran, T. (2022, June 8). *Social Media in Government: Benefits, Challenges, and How it's Used*. [https://Blog.Hootsuite.Com/Social-Media-Government/#5\\_tips\\_for\\_using\\_social\\_media\\_in\\_government](https://Blog.Hootsuite.Com/Social-Media-Government/#5_tips_for_using_social_media_in_government).
- Charalabidis, Y., Loukis, E., & Kleinfeld, R. (2012). Towards a Rationalisation of Social Media Exploitation in Government Policy-Making Processes. In *European Journal of ePractice* · [www.epracticejournal.eu](http://www.epracticejournal.eu) N° (Vol. 16). [www.padgets.eu](http://www.padgets.eu)
- Cho, C. H., & Khang, H. (2006). The state of internet-related research in communications, marketing and advertising:1994-2003. *Journal of Advertising*, 35(3), 143-163.
- Christian. (2013, June 17). *THE MEDIA'S ROLE IN THE POLICYMAKING PROCESS*.
- Cordella, A., & Tempini, N. (2015). E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. *Government Information Quarterly*, 32(3), 279-286. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.005>
- Criado, J. I., Rojas-Martín, F., & Gil-Garcia, J. R. (2017). Enacting social media success in local public administrations: An empirical analysis of organizational, institutional, and contextual factors. *International Journal of Public Sector Management*, 30(1), 31-47. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2016-0053>
- Echchakoui, S., & Mathieu, A. (2008). Marketing trends: content analysis of the major journals (2001-2006). *Proceedings of Administrative Sciences Association of Canada*, 114-126.
- Fitria, D., Husaeni, A., Bayu, A., & Nandiyanto, D. (2021). *Bibliometric Using Vosviewer with Publish or Perish (using Google Scholar data): From Step-by-step Processing for Users to the Practical Examples in the Analysis of Digital Learning Articles in Pre and Post Covid-19 Pandemic*. <https://doi.org/10.17509/ijost.v6ix>
- Grossman, E. (2022). *Media and Policy Making in the Digital Age*. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120>
- Jan van Eck, N., & Waltman, L. (2017). *VOSviewer Manual*.
- Livingstone, S. (2013). *Media consumption and public connection*.
- Madyatmadja, E. D., Sano, A. V. D., Sianipar, C. P. M., Nindito, H., & Bhaskoro, R. A. (2020). *Factors Influencing the Uses of Social Media within the Government: A Systematic Literature Review*.
- Mahdi, M. I. (2022, February 25). *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*. <https://DataIndonesia.Id/Digital/Detail/Pengguna-Media-Sosial-Di-Indonesia-Capai-191-Juta-Pada-2022>.

- Makhya, S., & Windah, A. (2019). THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA TOWARD ON PUBLIC POLICY CHANGES IN BANDAR LAMPUNG CITY.
- Mallig, N. (2010). A relational database for bibliometric analysis. *Journal of Informetrics*, 4(4), 564–580. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.06.007>
- McNutt, K. (2014). Public engagement in the Web 2.0 era: Social collaborative technologies in a public sector context. *Canadian Public Administration*, 57(1), 49–70.
- Medina, P. S. (2019). Limitations of Assessing Citizen Engagement Through Local Government Social Media Rankings: Implications for Policy and Practice. In *Researchgate*.
- Mergel, I. (2014). Social media adoption: Toward a representative, responsive or interactive government? *ACM International Conference Proceeding Series*, 163–170. <https://doi.org/10.1145/2612733.2612740>
- Muñoz-Leiva, F., Viedma-del-Jesús, M. I., Sánchez-Fernández, J., & López-Herrera, A. G. (2012). An application of co-word analysis and bibliometric maps for detecting the most highlighting themes in the consumer behaviour research from a longitudinal perspective. *Quality and Quantity*, 46(4), 1077–1095. <https://doi.org/10.1007/s11135-011-9565-3>
- Muyagi, P., & Olungurumwa, O. (2014). A PAPER ON THE ROLE OF THE MEDIA IN PUBLIC POLICY. <http://www.businessdictionary.com/definition/media.html#ixzz3NrEFesZH>
- Nguyen, K. M. (2021). *The Role of Social Media in Policy Formulation Improvement in California* [San Jose State University]. <https://doi.org/10.31979/etd.jt87-cb9v>
- Nugroho, Y., Siregar, F. M., & Shita, L. (2013). *Mapping Media Policy in Indonesia*. [www.fostrom.com](http://www.fostrom.com)
- Nurmandi, A. (2014). SOCIAL MEDIA USE: RETHINKING CIVIC ENGAGEMENT IN GOVERNMENT. <http://www.stasiareport.com/the-big-story/asia-report/indonesia/story/indonesia->
- Nurmandi, A., Almarez, D., Roengtam, S., Salahudin, Jovita, H. D., Kusuma Dewi, D. S., & Efendi, D. (2018). To what extent is social media used in city government policy making? Case studies in three asean cities. *Public Policy and Administration*, 17(4), 600–618. <https://doi.org/10.13165/VPA-18-17-4-08>
- Owen, D. (2018). The New Media's Role in Politics. In <https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-new-media-s-role-in-politics/>.
- Park, M. J., Kang, D., Rho, J. J., & Lee, D. H. (2016). Policy Role of Social Media in Developing Public Trust: Twitter communication with government leaders. *Public Management Review*, 18(9), 1265–1288. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1066418>
- Purcell, K. (2010). *Understanding the participatory news consumer How internet and cell phone users have turned news into a social experience*.
- Rathore, A. K., Maurya, D., & Srivastava, A. K. (2021). Do policymakers use social media for policy design? A Twitter Analytics Approach. *Australasian Journal of Information Systems Rathore*, 25.
- Sharma, M. (2020, October 6). *Role of Media in Policymaking*.
- Tupan. (2016). PEMETAAN BIBLIOMETRIK DENGAN VOSVIEWER TERHADAP PERKEMBANGAN HASIL PENELITIAN BIDANG PERTANIAN DI INDONESIA. [www.scopus.com](http://www.scopus.com)
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Yeung, D. (2018). Social Media as a Catalyst for Policy Action and Social Change for Health and Well-Being: Viewpoint. *Journal of Medical Research*, 20(3).